

Dekat dengan Ladang Migas

Dari Halaman 1

secara komprehensif.
"Kami mendorong adanya survei awal dan akuisisi data seismik agar potensi Migas bisa diidentifikasi lebih jelas," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas ESDM Aceh, Taufik mengatakan, pihaknya masih mencari data akurat soal potensi migas di wilayah 4 pulau yang masih bersengketa itu apalagi di perairan tersebut pernah menjadi wilayah kerja migas.
"Kami lagi cari data akurat, memang itu pernah menjadi wilayah kerja migas. Potensinya memang pernah ada sumur-sumur (migas) tua, tapi informasinya lagi kami gali kembali," kata

Taufik.
Sebelumnya, kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memutuskan empat pulau yang berada di perbatasan Aceh-Sumut masuk dalam status administrasi wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.
Empat pulau ini yaitu Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang dan Mangkir Ketek.
Status administratif itu tertuang dalam Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
Putusan itu mendapat reaksi penolakan dari warga Aceh yang mengklaim pulau-pulau terse-

but milik Aceh yang memiliki historis panjang dari dasar dokumen hukum dan catatan agraria seperti SK Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Atjeh Nomor 125/IA/1965.
Kemudian bukti surat kuasa dari Teuku Djohandsyah bin Teuku Daud kepada Teuku Abdullah bin Teuku Daud pada 1980 hingga adanya kebun yang digarap oleh warga Aceh.
Lalu sejumlah infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil, seperti tugu selamat datang, tugu koordinat yang dibangun oleh Dinas Cipta Karya dan Bina Marga pada tahun 2012, rumah singgah dan mushala (2012), serta dermaga yang dibangun pada tahun 2015.(**cnni/js**)

Kejagung Periksa Eks Dirut Pertamina

Dari Halaman 1

takan saksi EMM dimintai keterangan terkait perannya sebagai Dirut Pertamina kala itu.
"Karena telah ada koordinasi dengan JPU dan penyidik, saksi yang dipanggil berkaitan dengan kapasitas dalam status jabatan yang bersangkutan terkait dengan perannya," ujarnya kepada wartawan di Kejagung, Kamis (12/6).
Selain itu, pemeriksaan terhadap Elia juga dilakukan untuk keperluan penyidik dalam memenuhi unsur-unsur pidana para tersangka dalam pemberkasan.
Harli menambahkan, lima orang saksi lainnya turut diperiksa, yakni DS selaku Karyawan

PT Pertamina, NAL selaku Manager Treasury Settlement & Reporting PT Pertamina dan DDS selaku Sr. Manager Supply Planning PT Pertamina.
Kemudian JM selaku Authorized Agent/ Finance Officer PT Marsh Indonesia (Asuransi Kapal) dan GI selaku VP Procurement PT Berau Coal periode 2017 sampai 2023.
"Pemeriksaan yang bersangkutan untuk memperkuat pembuktian yang dilakukan penyidik. Kita harapkan kasus ini segera bisa dilimpahkan ke penuntutan dan persidangan," katanya.
Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka yang terdiri dari

enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Salah satunya yakni Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.
Kejagung menyebut total kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun. Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp2,7 triliun.
Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sekitar Rp9 triliun; kerugian pemberian kompensasi (2023) sekitar Rp126 triliun; dan kerugian pemberian subsidi (2023) sekitar Rp21 triliun.(**cnni/js**)

KPK Kaget Banyak Tambang Nikel

Dari Halaman 1

laporan BPKP, kok ada banyak tambang nikel ya di Raja Ampat?" kata Dian dalam diskusi yang digelar Greenpeace Indonesia di Jakarta, Kamis (12/6).
Secara umum, Dian mengatakan ada 10 permasalahan pada sektor pertambangan. Salah satunya, resentralisasi. Menurut dia, izin usaha pertambangan nikel umumnya terpusat di Jakarta.
Menurut Dian, UU Cipta Kerja memang memberikan kemudahan dalam berinvestasi tapi sulit dalam pengawasan. Umumnya, Dian

mengungkap ada banyak aturan tumpang tindih antara UU Ciptaker dan undang-undang yang lain.
"Rasanya Omnibus memberikan kemudahan investasi. Tapi untuk pengawasannya enggak ketemu. Enggak ada kemudahan untuk pengawasan, hanya kemudahan di hulu," kata Dian.
Selain itu, Dian mengatakan pihaknya juga mengungkap ketidakpatuhan perizinan. Menurut dia, dari sekitar 11 ribu izin usaha pertambangan, sebanyak 1.850 di antaranya tak memiliki Mine Planning and Production (MPP).
Dian mengaku pihaknya perlu mendalami sejumlah persoalan pada sektor izin usaha pertambangan. Termasuk di dalamnya kepatuhan

pajak pada perusahaan tambang.
"Sayangnya kalau untuk pajak pusat, kewenangannya ini sekarang ditarik semuanya ke pusat. Kanwil, KPP tidak punya lagi kewenangan. Ini agak sulit juga ini," kata Dian.
KPK, lanjut Dian, juga menyoroti model baru reaktivasi izin usaha pertambangan lewat pengadilan atau PTUN. Menurut dia, hal itu menjadi praktik baru yang belakangan kerap dilakukan izin usaha pertambangan untuk kembali beroperasi.
"Karena ada laporan juga. Jangan sampai ada modus. Mereka PTUN, mengatakan tak pernah ada bicara, tahu-tahu menang di pengadilan. Ini juga kita khawatirkan," katanya.(**cnni/js**)

Prabowo Kritik PMN BUMN

Dari Halaman 1

internasional, dia ada enggak PMN?" kritik Prabowo keras.
Sang Kepala Negara dengan lantang menunjukkan bahwa dirinya tak setuju dengan skema penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN. Oleh karena itu, Prabowo lebih memilih mencari mitra dari pihak swasta untuk menggarap proyek infrastruktur.
Presiden Prabowo Subianto kemudian berpesan

kepada jajaran anak buahnya untuk mempermudah pekerjaan sektor swasta yang tertarik berinvestasi.
"Infrastruktur, sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita, sebesar-besarnya, sebesar-besarnya," tegasnya.
"Saya menyambut baik pusat-pusat atau kantor-kantor, memfasilitasi semua proyek (investasi swasta). Dibantu, diamankan, dijaga supaya tidak terganggu rencana besar pembangunan besar terse-

but!" perintah Prabowo kepada para menternya.
Ia kemudian menyinggung peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Prabowo mengklaim badan baru tersebut juga akan ikut berinvestasi di sektor infrastruktur bersama pihak swasta.
"Danantara siap ikut investasi pada proyek infrastruktur ... Kita akan tegakkan hukum. Hanya dengan kepastian hukum, hukum yang benar, iklim usaha akan berkembang dengan baik," tutupnya.(**cnni/js**)

Pesawat Air India Jatuh di Dekat Bandara

Dari Halaman 1

tersebut.
Dekatan terdengar dan asap tebal mengepul di dekat Meghaninagar sehingga sempat menimbulkan kepanikan di area tersebut, demikian

laporan NDTV.
Tim pemadam kebakaran dan unit gawat segera menuju kecelakaan pesawat jenis 787-8. Semua penumpang dan awak pesawat dihawatirkan tewas dalam kecelakaan pesawat tersebut.
Tulisan ini merupakan bagian dari Fokus:

"Air India Jatuh di Ahmedabad"
Pesawat Air India jatuh di dekat Bandara Internasional Ahmedabad sesaat setelah lepas landas pada Kamis (12/6) waktu setempat. Pesawat jenis Boeing 787-8 Deamliner bernomor penerbangan AI-171 membawa 242 penumpang.(**cnni/js**)

Israel Semakin Berencana Serang Iran

Dari Halaman 1

mendatang.
Rencana itu mencuat di saat Amerika Serikat sedang bernegosiasi dengan Iran mengenai kesepakatan program nuklir Teheran.
Menurut beberapa sumber, AS dalam siaga tinggi usai menerima informasi mengenai kemungkinan serangan Israel ke Iran. Para sumber juga mengatakan Gedung Putih belum memberikan pengarahannya ke parlemen soal masalah ini.
Salah satu sumber menyebut Israel tampaknya akan melakukan serangan ini secara sepihak. Sumber-sumber dan pejabat sendiri hingga kini belum mengetahui apakah AS akan terlibat dalam aksi ini.
Israel belakangan uring-uringan setelah AS dan Iran berdialog membahas kesepakatan program nuklir sejak April lalu. Israel tak senang dengan situasi ini. Apalagi, pembicaraan itu mulai menunjukkan kemajuan.
Trump Bisa Murka

AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump memang ingin melanjutkan kesepakatan nuklir dengan Iran yang pernah dihentikan Washington pada 2018 lalu.
Oleh sebab itu, serangan Israel ke Iran bisa membuat Trump murka karena akan berdampak buruk pada progres negosiasi.
Sejalan dengan informasi soal serangan Israel ini, pemerintahan Trump telah memerintahkan seluruh kedutaannya di wilayah rawan untuk memberikan informasi mengenai ancaman bahaya serta langkah-langkah mitigasi.
Kedutaan dan misi tersebut antara lain yang berada di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Timur.
Sejumlah pejabat AS juga telah mengumumkan soal kepergian sukarela para karyawan yang tidak begitu penting dari Timur Tengah.
Kementerian Pertahanan AS turut mengumumkan kepergian para anggota keluarga militer dari lokasi di seluruh area operasi Komando Pusat AS (CENTCOM).

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Mei telah menyatakan bahwa pihaknya meyakini AS memikul tanggung jawab apabila Israel melancarkan serangan ke negaranya.
"Kami percaya bahwa jika terjadi serangan apa pun terhadap fasilitas nuklir Iran oleh rezim Zionis, pemerintah AS juga akan terlibat dan memikul tanggung jawab hukum," kata Araghchi saat itu.
Araghchi kemudian menekankan bahwa Iran tak akan tinggal diam apabila serangan semacam itu benar dilakukannya.
"Iran memperingatkan dengan tegas terhadap segala bentuk tindakan yang dilakukan rezim Zionis dan akan menanggapi dengan tegas setiap ancaman atau tindakan melawan hukum yang dilakukan rezim ini," tukas Araghchi.
Para sumber AS sendiri mengatakan kepada NBC News bahwa AS kemungkinan akan membantu Israel melalui pengisian bahan bakar atau informasi intelijen. Namun, mereka belum tahu pasti apakah rencana tersebut benar akan diambil Washington.(**cnni/js**)

Indonesia Kirim Bantuan 10 Ton Beras

Dari Halaman 1

bagian dari upaya merespons krisis kemanusiaan di Gaza.
Pengiriman akan dilakukan menggunakan kapal milik Tentara Nasional Indonesia (TNI). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan pengiriman diupayakan bisa dilakukan dalam waktu dekat, paling lambat akhir bulan ini.
Ia menyebut bantuan tersebut akan diberangkatkan dari Indonesia menuju kawasan sekitar Palestina, seperti Jordan.
"Mudah-mudahan dalam bulan ini sudah bisa berangkat," ujar Zulhas dalam konferensi pers sesuai rapat di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6).
Adapun beras yang dikirim berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan Badan Pangan akan menugaskan Perum Bulog untuk menyiapkan pengiriman bantuan tersebut.
Ia menambahkan pendanaan bantuan akan menggunakan anggaran dari Lembaga Dana

Kerja Sama Pembangunan Internasional (LD-KPI) atau Indonesian AID di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
"Tentunya kita upayakan dalam tiga minggu terakhir ini bisa disiapkan untuk proses loadingnya," kata Arief dalam kesempatan yang sama.
Arief menjelaskan proses pengiriman akan melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga pangan, serta TNI sebagai unsur pelaksana logistik. Pemerintah menargetkan pengiriman berlangsung dalam satu gelombang besar menggunakan jalur laut, agar distribusi dapat dilakukan secara efisien dan tepat sasaran.
Sebagai informasi, Jalur Gaza saat ini masih berada dalam kondisi blokade total sejak konflik dengan Israel kembali memanas pada Oktober 2023. Akibat blokade tersebut, pasokan makanan, air bersih, dan obat-obatan sangat terbatas.
Laporan dari badan-badan kemanusiaan internasional menyebutkan lebih dari 2 juta warga di Gaza kini menghadapi kelangkaan

pangan ekstrem. Banyak dari mereka, termasuk anak-anak, mengalami malnutrisi dan tidak mendapatkan akses layanan medis dasar.
Situasi ini diperparah oleh kerusakan infrastruktur, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya akibat serangan militer.(**cnni/js**)



Gubernur Muzakir

Dari Halaman 1

Aceh menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kini menuai polemik.
Keempat pulau ini sebelumnya masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Aceh Singkil. Namun kini resmi tercatat sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.
Keputusan ini menimbulkan gejolak, terutama dari masyarakat Aceh yang merasa kehilangan wilayah secara sepihak.(**cnni/js**)



Memperebutkan Pulau

Dari Halaman 1

pada hukum nasional. Penetapan batas wilayah antarprovinsi, termasuk pulau-pulau kecil terluar, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN. Maka ketika pemerintah pusat memutuskan bahwa empat pulau tersebut masuk Sumatera Utara, proses itu tentu tidak berlangsung sewenang-wenang. Ia didasarkan pada peta, data penduduk, sejarah administratif, hingga catatan pengelolaan pelayanan publik di kawasan tersebut.
Namun penolakan dari Pemerintah Aceh tak bisa langsung disalahkan. Ada warisan sejarah panjang yang menjadikan persoalan batas wilayah tak sekadar soal koordinat, melainkan menyentuh rasa identitas dan eksistensi daerah. Aceh memiliki status kekhususan berdasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Dalam perspektif ini, keberadaan pulau-pulau tersebut mungkin dipandang sebagai bagian integral dari sejarah peradaban dan kebudayaan Aceh. Bahkan, tak jarang muncul narasi bahwa pelepasan wilayah adalah simbol hilangnya "marwah" Aceh di mata pusat.

Namun perlu disadari, semangat otonomi daerah bukanlah lisensi untuk melakukan resistensi tanpa dasar. Pemerintah daerah tetap merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional yang hierarkis dan berbasis hukum. Menolak keputusan pusat tanpa argumentasi hukum yang kuat justru dapat menimbulkan preseden buruk dan membuka potensi konflik antarwilayah.
Seyogianya, yang menjadi pusat perhatian bukanlah siapa yang "berhak memiliki" pulau tersebut, melainkan siapa yang paling siap melayani warganya. Apakah keempat pulau itu selama ini lebih mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan logistik dari Sumatera Utara? Apakah penduduknya lebih merasa bagian dari Sumut daripada Aceh, atau sebaliknya? Di sinilah pendekatan sosio geografis dan demografis menjadi lebih relevan ketimbang klaim emosional atau simbolik semata.
Dalam banyak studi geopolitik wilayah perbatasan, konflik administratif seperti ini seringkali dipicu oleh lemahnya dokumentasi historis, tumpang tindih peta, dan absennya forum dialog terbuka antara pemerintah provinsi terkait. Sayangnya, kita sering kali menyaksikan penyelesaian yang elitis, tanpa melibatkan masyarakat terdampak. Padahal, masyarakat pulau itulah yang seharusnya menjadi aktor utama dalam proses penetapan wilayah, bukan hanya objek tarik menarik dua kekuasaan administratif.
Dalam kerangka penyelesaian konflik wilayah, pendekatan koordinatif dan partisipatif adalah pilihan terbaik. Pemerintah Pusat sebaiknya membuka forum konsultatif tripartit antara Pemprov Aceh, Pemprov Sumut, dan warga pulau. Sebuah mekanisme audit ulang batas wilayah yang berbasis pada data objektif, peta lama, pelayanan publik terkini, dan aspirasi warga lokal perlu dilakukan. Pendekatan semacam ini lebih berkeadilan daripada sekadar mempertahankan ego daerah.

Dalam konteks ini, Pemerintah Aceh pun dapat mengambil jalan konstitusional, seperti judicial review, pengajuan keberatan administratif, hingga diplomasi antardaerah dalam forum nasional seperti Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Penolakan bukan tidak boleh, namun penolakan yang produktif adalah yang berbasis data, berpijak pada hukum, dan bertujuan mencari solusi, bukan sensasi.
Lebih dari itu, konflik batas wilayah ini semestinya menyadarkan kita akan pentingnya reformasi tata kelola perbatasan daerah. Pemerintah Pusat dan daerah perlu membangun sistem dokumentasi wilayah yang terintegrasi dan transparan. Setiap peta wilayah seharusnya tidak hanya menjadi milik kementerian teknis, tetapi juga bisa diakses oleh publik dan akademisi agar tidak menimbulkan spekulasi liar.

Yang juga tidak boleh dilupakan: setiap sengketa wilayah selalu membawa risiko marginalisasi terhadap masyarakat pulau. Ketika pemerintah daerah berseteru soal peta dan batas, masyarakat kecil di pulau-pulau itu bisa menjadi korban ketidakpastian status hukum, layanan publik yang tumpang tindih, hingga terhambatnya pembangunan infrastruktur. Bukankah seharusnya mereka yang paling dilindungi dan dihidulungi?
Konflik ini bukan yang pertama di Indonesia. Kita pernah menyaksikan ketegangan antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, antara Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, antara NTT dan NTB. Namun jika pola penyelesaian tetap seperti sekarang—tanpa dialog, tanpa data terbuka, dan hanya melalui media massa—maka sejarah akan terus berulang.

Saatnya kita memahami bahwa pemekaran, pemindahan, atau pengalihan wilayah tidak bisa disikapi dengan paranoia. Semua itu adalah bagian dari proses negara yang terus berkembang, dan mesti disikapi dengan kedewasaan politik, ketajaman hukum, dan empati sosial.
Empat pulau itu bukan hanya tentang Aceh atau Sumut. Ia adalah cermin bagaimana negara memperlakukan rakyatnya di wilayah pinggiran. Jika para pemimpin masih sibuk berseteru soal garis di peta, maka siapa yang akan memastikan anak-anak di pulau itu tetap bisa sekolah, berobat, dan merasa memiliki tanah air yang mereka pijak?